BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan, tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya setiap negara. sedangkan Legislatif dalam terminology fiqh disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa. Secara harfiah Ahl al-Halli wa al-'aqd berarti orang yang dapat memusatkan dan mengikat. Di Indonesia disebut dengan DPR Republik Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat di Inonesia) untuk tingkat pusat dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk tingkat daerah, baik tingkat I dan tingkat II.[1]

Membicarakan legislatif di tingkat daerah terlebih dahulu mengetahui bagaimana letak legislatif daerah dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kemudian apa landasan hukum legislatif daerah serta bagaimana susunan, cara kerja, dan peranannya dalam sistem dan struktur pemerintah di Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan Indonesia atau disebut juga sub bagian dari sistem pemerintahan Negara Indonesia.[2] Dalam pemerintahan Islam di perlukan adanya sebuah lembaga musyawarah, sejarah

[1]Inu Kencana Safi'i, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: PT. Renika Cipta,1994), 59.
[2]BN. Marbun,.*DPRD Pertumbuhan, Masalah Dan Masa Depannya* (Jakarta: Erlangga, t.t.), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengenalkan lembaga itu dengan istilah *Ahl al-Hal Wa al-Aqd* dalam konsep kenegaraan Indonesia dikenal dengan MPR dan DPR.

Jika musyawarah maksudnya adalah partisipasi politik dalam pemikiran politik barat, jika pemikiran politik barat pada dasarnya adalah persoalan etika, yang menjadi inti dari tradisi pemikiran barat tersebut adalah konsepsi manusia sebagai mahluk rasional yang memiliki kebebasan dan kehendak menentukan dirinya. Dalam pandangan barat, yang berhak menetapkan nilai-nilai moral adalah akal dan kehendak manusia[3]. Dalam Islam didominasi oleh perdebatan tentang system pemerintahan atau lebih tepatnya hubungan khalifah dan Negara[4]. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang meupakan tujuan dari semua kewenangan dalam islam, sebagaimana yang dikatakana oleh Ibnu Taimiyyah"semua kewenangan dalam islam tujuannya hanyalah amar *ma'ruf nahi munkar.*[5]

Penelitian ini mencoba membahas bagaimana peran DPRD Kabupaten Sumenep. Akan tetapi penelitian hanya memfokuskan pada salah satu fraksi saja, yaitu Fraksi Kebangkitan Bangsa. Fraksi Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang mendominasi di DPRD Kabupaten Sumenep. Di mana anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep berjumlah 12 (dua belas) kursi. Beberapa periode PKB selalu meraih suara terbanyak mulai 1999,

---

[3] Samsul Bahri, Politik Barat,dalam http:/www.idealismeku.wordpress.com (6 juli 2010)
[4] Politik Islam, dalam http:/www.albahar.wordpress.com (6 juli 2010)
[5] Farid Abdul Kholiq. *Fikih Poltik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2004, dan 2009. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep yang mana perannya cukup mewakili anggota fraksi lainnya di DPRD secara keseluruhan.

DPRD dengan pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang erat meski dalam UU. Nomer 27 tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintahan mempunyai wilayah kerja dan fungsinya masing-masing, akan tetapi kerja sama dan kemitraan antara DPRD dan pemerintahan daerah harus tetap terjaga, karena bagaimanapun fungsi yang di jalankan mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini merupakan posisi yang sangat menguntungkan bagi DPRD yang menjadi mitra pemerintah daerah agar tercipta hubungan kerja yang harmonis.

Adapun peran Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumenep bersumber dari UU.No.27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu pasal 341 dan pasal 342 di sebutkan:

> Pasal *341: DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum dipilih melalui pemilihan umum.*
>
> *Pasal 342: DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupatean/kota.*

Secara teknis masih terdapat sejumlah persiapan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menjamin kewenangan dan fungsi-fungsinya tersebut secara efektif. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi tersebut yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah yaitu DPRD harus mampu menciptakan *check and balance* supaya pelaksanaan pensejahteraan rakyat dapat terwujud dengan baik. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, kepada DPRD disamping di berikan tugas, wewenang dan hak-hak juga diberikan fungsi-fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan yang sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam ruang lingkup sebagai Lembaga Legeslatif Daerah. Dengan diberikan fungsi tersebut, dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitra sejajaran dengan Lembaga Eksekutif dalam menyusun anggaran, menyusun dan menetapkan berbagai Peraturan Daerah, serta dari sisi kontrol adalah sejauh mana DPRD telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, upaya penulis di sini untuk dapat menjelaskan peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep yang akan dianalisa melalui *fiqh siyāsah*.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tugas dan Wewenang Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep
3. Analisis fiqih siyasah terhadap peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan sebagai berikut:

1. Peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan legislasi menurut UU.No.27 tahun 2009
2. Perspektif fiqih siyasah terhadap peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan legislasi menurut UU.No.27 tahun 2009?
2. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam kajian ini adalah "Peran Fraksi Kebangkitan Bangsa Di DPRD Kabupaten Sumenep Menurut UU. No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Dalam Perspektif Fiqih Siyasah"

Kajian tentang PKB sebelumnya telah dilakukan oleh Syamsul Arifin pada tahun 2010. yang berjudul" Analisis pemikiran *Ahlu Sunnah Wa al Jama'ah* (ASWAJA) terhadap PKB dalam penguatan fungsi legislatif di DPRD kota Surabaya"[6]. Skripsi tersebut membahas tentang Aswaja menjadi nilai-nilai yang dijadikan atas perjuangan PKB dalam rangka penguatan di lembaga legislatif.

Selain itu pula terdapat skripsi yang berjudul " Fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Mojokerto dalam UU. No. 32 tahun 2004 (studi analisis dalam perspekttif *fiqih siyasah*)[7] yang ditulis oleh Nur Syamsiyah tahun 2007. Skripsi tersebut membahas tentang fungsi, tugas dan wewenang DPRD secara keseluruhan atau secara umum yang disesuaikan dengan UU. No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Sedangkan dalam hal ini, penulis berupaya menspesifikasikan pembahasan yang berkaitan dengan peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD

---

[6] Syamsul Arifin, Skripsi :*Analisis Pemikiran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah(ASWAJA) terhadap PKB Dalam Penguatan Fungsi Legislatif di DPRD Kota Surabaya 2004-2009.Fakultas* Syariah, Tahun 2010.

[7] Nur Syamsiyah, Skripsi :*Fungsi , "Tugas Dan Wewenang DPRD Kabupaten Mojokerto dalam UU.No 32 Tahun 2004(Studi Analisis Dalam Perspektif Fiqih Siyasah)" Fakultas Syari'ah,* Tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sumenep periode 2009-2014 menurut UU. No.27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penulisan skripsi pada umumnya mempunyai tujuan tertentu, maka tujuan dari skipsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Karya ilmiah ini di harapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

   Hasil studi ini dapat menambah wawasan tentang peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep menurut UU.No.27 tahun 2009.

2. Aspek Terapan (praktis)

   Hasil studi dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar menjadi lebih baik, komunikatif, maupun edukatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Judul skripsi adalah *"Peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep periode 2009-2014 menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dalam perspektif fiqih siyasah"*

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud judul di atas, maka perlu di jelaskan arti kata sebagai berikut:

Peran : Berlaku dan bertindak[8]

Fraksi : Pengelompokan anggota-anggota DPR atau DPRD yang terdiri dari kekuatan sosial, politik, dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat, [9]dalam hal ini Fraksi Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sumenep periode 2009-2014.

FKB : Singkatan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah/ 23 Juli 1998 Masehi.[10] Dengan prinsip perjuangannya adalah dengan pengabdian kepada Allah SWT. menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran,

---

[8] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 585.

[9] Inu Kencana Syafi'i. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 62.

[10] Eman Hermawan, *PKB Masa Depan* (Jakarta, DPP PKB, t.t.), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljama'ah* (AD PKB: III:4). Dalam penulisan skripsi ini nantinya akan lebih ditekankan pada **"Fraksi Kebangkitan Bangsa"** sebagai mesin politik PKB dalam hal memperjuangkan kebijakan publik di dalam DPRD Kab. Sumenep periode 2009-2014.

DPRD : Singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebuah lembaga perwakilan rakyat yang di pilih secara langsung oleh rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif Daerah yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu). Pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan dengan sistim proporsional dengan daftar calon terbuka. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Anggota DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang. Jumlah ini tergantung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari jumlah penduduk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota.[11]

UU.No.27 tahun 2009 : Undang-Undang No.27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD. DPRD.

Perspektif : Pandangan sebagai acuan, sudut pandang[12]

Fiqih siyasah : Ilmu yang mempelajari tentang hal ihkwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[13]

H. Metode Penelitian

1. Data yang di kumpulkan

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data tentang profil Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep periode 2009-2014.

---

[11] Ibid, 69.

[12] M. Dahlan ,Y. Al Barry dan L lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya :Target Press, 2003), 606.

[13] J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,* ?(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Fraksi Kebangkitan Bangsa menurut UU. No.27 tahun 2009 oleh DPRD Kabupaten Sumenep periode 2009-2014.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah:

1) Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung di peroleh penulis di lapangan.[14] Sumber data primer ini berupa

1. Hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Sumenep tentang fungsi, tugas dan wewenang Fraksi Kebangkitan Bangsa
2. UU. No 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD
3. UU. No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari buku yang relevan guna melengkapi data yang diperoleh daridata primer. Data diperoleh berupa data sekunder adalah, diantaranya:

1) Inu Kencana Syafi'i, " *Sistem Pemerintahan Indonesia*"
2) *Farid* Abdul *Khaliq*, " *Fiqih Politik Islam*"

[14] Burhan Bangin, *Metode Penelitian Sosial:Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya :Universiyas Airlangga,2001),129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) B.N. Marbun. " *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya*"

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang menjawab pertanyaan tersebut.[15]

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan ketua atau komisi DPRD Kabupaten Sumenep dan anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa tentang peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep periode 2009-2014 menurut UU. No 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dalam perspektif Fiqih Siyasah.

b. Observasi

Observasi adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent.[16] Peneliti mengamati kronologis yang terjadi di Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumenep.

c. Studi Dokumen

---

[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatuf* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

[16] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung : Al Fabeta, 2008), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi adalah hasil penelitian baik berupa tulisan, gambar selama penelitian. Data yang yang di peroleh berupa struktur DPRD dan Fraksi Kebangkitan Bangsa kabupaten Sumenep.

d. Teknik Mengolah Data

Teknik mengolah data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *editing* dan *organizing*.

a) *Editing*

Dalam hal ini mengoreksi dengan cermat beberapa data yang di dapatkan di lapangan demi relevansi dan kelengkapannya terhadap kepentingan dalam penelitian ini.

b) *Organizing*

Menyusun data dengan teknik pengumpulan data yang di peroleh selama penelitian, baik dari hasil wawancara, dokumen atau literatur yang ada yaitu dengan cara mengelompokkan dan menelaah dalam kerangka yang sudah di rencanakan sesuai dengan kajian yang ada dari bahan yang di himpun.

4. Teknik Analisis Data

Tahap ini adalah analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian penulis melakukan redaksi data dengan cara membuat rangkuman inti. Data yang penulis peroleh dari lapangan dianalisis dengan deskriptif verifikatif yaitu menggambarkan mengenai situasi berdasarkan pada data yang diperoleh dan literatur yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengkaji dan memverivikasi tentang peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep periode 2009-2014 menurut UU. No 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dalam perspektif fiqih siyasah.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Kemudian data tersebut di analisis secara kritis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan pada yang bersifat umum. Metode ini di gunakan untuk menganalisa data khusus tentang peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep khususnya pada periode 2009-2014, kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu mengenai fiqih siyasah tentang peran Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumenep.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih tertib susunannya, maka di lakukan pembagian sistematika dalam lima bab:

Bab I : Pendahuluan, di awali dengan pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Menjelaskan konsep fiqh siyasah tentang legislatif. Yang terdiri dari pengertian, tugas dan wewenang legislatif dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Menjelaskan data hasil penelitian yang terdiri dari peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep menurut UU. No 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, dimana terdapat profil di antaranya struktur Fraksi Kebangkitan Bangsa, tugas dan wewenang Fraksi Kebangkitan Bangsa serta peran Fraksi Kebangkitan Bangsa, pelaksanaan peran susunan dan kedudukan Fraksi Kebangkitan Bangsa serta tata cara pengawasan dan kinerja Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep.

Bab IV : Menjelaskan tentang analisis *Fiqih Siyasah* dalam kinerja Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep menurut UU. No 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id